

## Peran Kepala Kampung dalam Implementasi Kebijakan Dana Kampung Distrik Manimeri

Manuel Horna, Taufani C. Kurniawan, Mafizatun Nurhayati

Program Pascasarjana, Universitas Terbuka

hornaimanuel54@gmail.com

### ABSTRACT.

*This study aims to: 1) To determine the role of the village head in the communication of village fund policy implementation in Manimeri District. 2) To find out the role of the village head in implementing the village fund policy in Manimeri District. 3) To find out the role of the village head in the disposition of village fund policy implementation in Manimeri District. 4) To find out the role of the village head in the bureaucratic structure of implementing village fund policies in Manimeri District. This research was conducted with interviews with the village heads of Banjar Asouy, Atibo and Bumi Saniari. By using descriptive qualitative research methods and using Edward III Analysis and the Miles and Huberman approach model. The role of the village heads of Banjar Ausoy, Atibo and Bumi Saniari is related to communication, that the village head is the power in determining the policy for implementing village funds and conducting socialization to the community. The role of the village heads of Banjar Ausoy, Atibo and Bumi Saniari related to resources, namely the ability of the implementers to implement policies. As for the role of the village heads of Banjar Ausoy, Atibo and Bumi Saniari regarding disposition, it is said that policy implementers have responses or perceptions that strongly support policies, especially in improving development programs. And the role of the village heads of Banjar Ausoy, Atibo and Bumi Saniari related to the bureaucratic structure in carrying out the tasks of implementing village government and implementing village development.*

**Keywords: Role of Village Heads, Policy Implementation, Village Funds**

### ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui peran kepala kampung dalam komunikasi implementasi kebijakan dana kampung di Distrik Manimeri. 2) Untuk mengetahui peran kepala kampung dalam sumber daya implementasi kebijakan dana kampung di Distrik Manimeri. 3) Untuk mengetahui peran kepala kampung dalam disposisi implementasi kebijakan dana kampung di Distrik Manimeri. 4) Untuk mengetahui peran kepala kampung dalam struktur birokrasi implementasi kebijakan dana kampung di Distrik Manimeri. Penelitian ini dilakukan wawancara bersama kepala desa/kampung Banjar Asouy, Atibo dan Bumi Saniari. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta menggunakan Analisis Edward III dan Model pendekatan Miles dan Huberman. Adapun peran kepala kampung Banjar Ausoy, Atibo dan Bumi Saniari terkait komunikasi, bahwa kepala desa selaku kuasa dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan dana desa serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Adapun peran kepala kampung Banjar Ausoy, Atibo dan Bumi Saniari terkait sumber daya yaitu adanya

kemampuan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Adapun peran kepala kampung Banjar Ausoy, Atibo dan Bumi Saniari terkait disposisi dikatakan pelaksana kebijakan mempunyai tanggapan atau persepsi yang sangat mendukung kebijakan terutama dalam meningkatkan program pembangunan. Dan adapun peran kepala kampung Banjar Ausoy, Atibo dan Bumi Saniari terkait struktur birokrasi melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan desa.

**Kata Kunci : Peran Kepala Desa/Kampung, Implementasi Kebijakan, Dana Desa/Kampung.**

## PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, keuangan desa menjadi hal yang sangat penting untuk menyokong keberhasilan dalam mencapai tujuan dan cita-cita desa. Keuangan desa dipengaruhi oleh perkembangan keuangan pada umumnya. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa juga dipengaruhi oleh hal keuangan desa itu sendiri terutama di bidang pembangunan dan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 1, bahwa salah satu keuangan desa adalah dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Begitupun dengan Dana Desa ini yang dikucurkan oleh pemerintah pusat yang bersumber dari APBD. Dana Desa ini merupakan salah satu sumber keuangan desa.

Dalam proses penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa harus dilakukan dengan maksimal dan tepat, jika ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30%, maka Bupati atau Walikota meminta penjelasan kepada kepala desa dan juga meminta pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua mengenai dana yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dijelaskan bahwa apabila terdapat dana sisa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan. Sanksi tersebut berupa pemotongan penyaluran dana desa tahun anggaran berikutnya sebesar dana desa tahun anggaran berjalan.

Hal penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dana desa dilakukan secara mandiri oleh desa, dan uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat diharapkan pelaksanaan kegiatan bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja.

Implementasi kebijakan dana desa merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk memenuhi pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan akses dan kreativitas masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari memenuhi kebutuhannya. Implementasi penggunaan dana desa tersebut diharapkan dapat berjalan dengan lancar, tertib, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan APB Desa setiap tahun. Hal ini dapat tercapai tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia aparatur pemerintah desa yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang baik dalam pengelolaan anggaran desa. Selain itu, juga harus didukung oleh partisipasi aktif seluruh masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, karena masyarakat desa merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Di samping itu, juga harus memperhatikan ketersediaan potensi sumber daya alam dan kondisi lingkungan. Dengan demikian diharapkan implementasi penggunaan dana desa dapat berjalan dengan baik dan lancar (Salim, 2021).

## **Manajemen Sumber Daya Manusia**

Manajemen sumber daya manusia (human resources management) adalah rangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Manajer memiliki peran besar dalam mengarahkan orang-orang yang berada di organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, termasuk memikirkan bagaimana memiliki manajemen sumber daya manusia (MSDM) yang mampu bekerja secara efektif dan efisien. Memang sudah menjadi tujuan umum bagian MSDM untuk mampu memberikan kepuasan kerja yang maksimal kepada pihak manajemen perusahaan yang lebih jauh mampu membawa pengaruh pada nilai perusahaan (company value) baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Agar pengertian MSDM ini lebih jelas, di bawah ini dirumuskan dan dikutip definisi yang dikemukakan oleh para ahli menurut Marwansyah (2016) berpendapat bahwa manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial.

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2017) MSDM adalah suatu pendekatan dalam mengelola masalah manusia berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu:

- a. Sumber daya manusia adalah harta/aset paling berharga dan penting yang dimiliki organisasi/perusahaan karena keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh unsur manusia.
- b. Keberhasilan sangat mungkin dicapai, jika kebijakan prosedur dan peraturan yang berkaitan manusia dari perusahaan saling berhubungan dan menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan.
- c. Budaya dan nilai organisasi perusahaan serta perilaku manajerial yang berasal dari budaya tersebut akan memberi pengaruh besar terhadap pencapaian hasil terbaik.

### **Peran Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Kebijakan**

Sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya tersebut bisa meliputi sumberdaya manusia yaitu staf yang bekerja sesuai keahlian pada bidangnya, sumberdaya anggaran sebagai penunjang dalam implementasi program. Karena tanpa anggaran implementasi program tidak akan terwujud dengan sempurna, dan sumberdaya kewenangan dimana pelaku kebijakan harus diberi wewenang dalam membuat keputusan dalam melaksanakan kebijakan atau program. Sumberdaya manusia dalam implementasi program Bedah kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian ini adalah Tim koordinasi program Bedah kemiskinan rakyat sejahtera berbasis pertanian terutama Bidang hortikultura yang memegang program tersebut yang sebagai Leading Sector, program ini merupakan salah satu turunan dari Kementrian pertanian yang meluncurkan program baru pengentasan kemiskinan dengan berbasis pertanian. Sumberdaya kewenangan ditujukan melalui tugas dan juga fungsi tim koordinator program untuk menjalankan tupoksi dan kemampuannya tersebut (Widodo, 2010).

### **Dana Desa**

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu menurut Lili (2018) dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses 9 penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat

pedesaan. Berdasarkan referensi diatas dana desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.

## **Peranan Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia**

Peranan manajemen sumber daya manusia dalam menjalankan aspek sumber daya manusia, harus dikelola dengan baik sehingga kebijakan dan praktik dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan perusahaan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017). Tempat Penelitian ini direncanakan akan di lakukan di desa/kampung Bumi Saniari, Banjar Ausoy dan Atibo Kecamatan Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Waktu yang di gunakan dalam penelitian ini, oleh peneliti di rencanakan dalam Jangka Waktu Dua Bulan atau Enam Puluh hari lamanya dari bulan Desember 2021 sampai Mei 2022. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan sekunder. Berdasarkan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dan sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Dokumentasi, Interview atau Wawancara.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data, yaitu menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga mewawancarai lebih dari satu subyek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda, sebagai cross check terhadap data yang sudah terkumpul. Terdapat empat aktivitas yang dilakukan melalui pendekatan ini, yaitu: Pengumpulan data, Reduksi data, Display data dan Verifikasi dan menarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil wawancara bersama kepala desa/kampung Atibo yaitu Bapa Seimon Iba, dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dana desa/kampung. Dengan dilakukannya sosialisasi yang diadakan di desa/kampung atibo kepala desa/kampung mengundang beberapa RT, RW dan masyarakat lainnya untuk mengikuti sosialisasi tersebut, dengan beberapa hambatan yang dilalui kepala desa/kampung atibo ini melihat masyarakat nya kebanyakan petani. Dapat diketahui juga beberapa masyarakat tidak dapat mengambil bagian dikarenakan

memiliki kesibukan masing-masing. Kepala desa/kampung juga menungaskan kepada beberapa aparat desa/kampung untuk mensosialisasikan terkait pembentukan desa/kampung Atibo tersebut, dengan mendatangi beberapa masyarakat yang tidak mengikuti sosialisasi. Sampai saat ini komunikasi dengan beberapa aparat kampung berjalan dengan baik serta menyusun beberapa program lama serta program baru untuk kedepannya. Kepala desa/kampung juga berkomunikasi dengan beberapa pihak-pihak luar dimana sebelum dilakukannya musyawarah ini beberapa kepala kampung termasuk kepala kampung atibo menyampaikan beberapa program-program tahun sebelumnya dan masuk ke tahun anggaran baru. Sehingga program ini sudah terlaksana dan berjalan dengan baik. Kepala desa/kampung juga berkomunikasi bersama masyarakat serta membawa aparat kampung untuk mengetahui apa saja yang sudah dikelola masyarakat Atibo dari tani tersebut. Dengan ini memudahkan kepala kampung memberikan wawasan/ide apa saja yang akan dikelola lagi kedepannya.

Kecenderungan jawaban responden pada indikator komunikasi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi komunikasi masih perlu ditingkatkan (Yalia, 2014). Wawancara dengan kepala desa/kampung Banjar Ausoy, Atibo dan Bumi Saniari dengan adanya pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditranmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa faktor pendukung dan penghambat terkait hubungan komunikasi dengan implementasi kebijakan dana desa. Beberapa faktor pendukung tersebut diantaranya:

- a. Adanya transmisi dalam bentuk sosialisasi yang rutin dilaksanakan oleh pemerintah desa, baik pada saat Musrenbangdes maupun pada saat penyusunan RKPDes (opurtunity/pelung).
- b. Kejelasan informasi (clarity) dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan baik (strength/kekuatan).
- c. Konsistensi (consistency) dalam penyampaian informasi ataupun perintah, tidak terdapat informasi atau perintah yang bertentangan (strength/kekuatan).

Faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah faktor penerima pesan dalam hal ini masyarakat. Informasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat akan dengan mudah mempengaruhi sikap dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal tersebut juga dipengaruhi dan didukung oleh keengganan masyarakat dalam menghadiri rapat dan musyawarah penyusunan rencana kerja pemerintahan desa dan sosialisasi desa.

Hasil wawancara bersama kepala desa/kampung Atibo yaitu Bapa Semion Iba, dengan mengelola beberapa dana kampung memerlukan SDM/pegawai, SDM/pegawai yang ada di balai kampung atibo sudah mencukupi. Dengan 3 beberapa seksi atau bidang yaitu pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan pelayanan, sekretaris kampung serta 3 kaur yaitu kaur perencanaan, kaur keuangan dan kaur tata usaha lainnya. Dengan pelaksanaan program yang ada di desa/kampung atibo ini masih memerlukan pembinaan-pembinaan untuk aparat/perangkat kampung, sehingga bisa menjadi lebih baik dalam pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan sampai saat ini sudah berjalan dengan baik dengan menyampaikan program-program yang di laksanakan di Musyrembang dan berkordinasi bersama tokoh-tokoh lainnya.

Hasil wawancara bersama kepala kampung/desa di Bumi Saniari yaitu Bapa Suharto Sangaji, dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang ada, kepala kampung/desa bumi saniari ini melakukan secara terbuka dengan aparat kampung keluar masuknya dana tersebut selalu akan di bicarakan bersama masyarakat yang ada, sehingga program yang akan dibentuk nanti berjalan dengan baik dan tidak ada halangan. Proses pemberdayaan yang ada di kampung/desa bumi saniari ini sudah sesuai dengan yang diharapkan walaupun ada beberapa program tidak semuanya terpenuhi.

Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu diperoleh beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat disposisi atau sikap. Faktor-faktor pendukung tersebut diantaranya adalah:

- a. Persepsi para pelaksana kebijakan yang selalu mendukung kebijakan dana desa dalam membangun infastruktur desa (opportunity/pejuang)
- b. Respon positif para pelaksana kegiatan dana desa terkait adanya kebijakan ini unruk pembangunan infrastruktur desa (opportunity/pejuang).
- c. Adanya tindakan atau pengambilan langkah-langkah kongkrit penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa, yang berpedoman dengan peraturan desa, bupati dan undang-undang dan menjalankan rencana pembangunan desa yang disusun dalam RPJMDesa dan RKPDesa (strength/kekuatan).

## **KESIMPULAN**

1. Peran kepala kampung dalam komunikasi implementasi dana desa yaitu bahwa Kepala Desa selaku kuasa dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan dana desa sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa melalui rapat desa dengan mengundang

- masyarakat aparat desa dan lembaga yang ada di desa. Namun, partisipasi masyarakat masih kurang.
2. Peran kepala kampung dalam sumber daya implementasi dana desa yaitu dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan salah satunya adalah sumber daya yang tersedia, karena sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Dalam hubungan sumber daya dengan pelaksanaan dana desa dapat disimpulkan bahwa adanya kemampuan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dana desa sudah mampu karena sudah berpengalaman walaupun masih perlu diadakan pelatihan pengelola dana desa.
  3. Peran kepala kampung dalam disposisi implementasi dana desa dapat dikatakan bahwa para pelaksana kebijakan dana desa mempunyai tanggapan atau persepsi yang sangat mendukung kebijakan terutama dalam upaya meningkatkan program pembangunan desa dan mengharapkan dana dapat ditingkatkan karena sangat bermanfaat dalam peningkatan program pembangunan.
  4. Peran kepala kampung dalam struktur birokrasi implementasi kebijakan dana desa sebagai salah satu tugas dan fungsi yang harus dijalankan dengan baik, sehingga implementasi dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan lancar. Faktor struktur birokrasi sangat berpengaruh dalam implementasi penggunaan dana desa di desa Banjar Ausoy, Atibo dan Bumi Saniari.

## SARAN

1. Bagi pimpinan desa/kampung Banjar Ausoy, Atibo dan Bumi Saniari hendaknya lebih mengimplementasikan fungsi-fungsi kepemimpinan, khususnya faktor perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan. Hendaknya juga memperhatikan beban kerja, kondisi sosial, dan perilaku bawahannya serta memperhatikan program dan proses kerja seluruh komponen organisasi. Yang terpenting ialah menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif yang didukung oleh kemampuan pimpinan dalam menghadapi pengaruh-pengaruh baik internal maupun eksternal. Menciptakan pandangan baru yang meyakinkan bawahan atau para pengikutnya, dan memiliki kemampuan untuk menerjemahkan pandangan itu menjadi sebuah kenyataan.
2. Bagi perangkat desa/kampung, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja, dengan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada konsumen atau masyarakat. Lalu mampu mengemban tugas dan tanggungjawab yang dibebankan dalam pelaksanaan kerja. Memperlihatkan kemampuan dalam pelaksanaan kerja. Serta Berinisiatif, kreatif, dan inovatif dalam melaksanakan tugas.

3. Dibutuhkan sosialisasi pada setiap rancangan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah desa lebih ditingkatkan dari sebelumnya, hal ini berguna untuk mengurangi penolakan dan sikap apatis dari masyarakat, dengan sosialisasi yang lebih baik maka warga akan merasa ikut serta dan merasa turut diajak dan dibutuhkan sehingga akan menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.
4. Para pelaksana kebijakan diharapkan lebih diberikan pengetahuan dan pemahaman agar tidak ada lagi permasalahan terkait kurangnya sumberdaya manusia yang ada pada pemerintahan desa tersebut.
5. Diharapkan kedepan sistim informasi desa dapat lebih dikembangkan dengan baik, agar informasi terkait potensi yang dimiliki desa maupun perputaran keuangan desa dapat lebih diakses oleh masyarakat luas, sehingga meningkatkan transparansi keuangan desa, hal ini agar kepercayaan masyarakat lebih meningkat dari sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. G Subarsono. (2005) . Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- A. Wahab. (2012). Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik. PT Bumi Aksara. Jakarta
- A.Rahmawati. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Adi Sasmita, R. (2011). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino dan Leo. (2006). Politik & Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung
- Andi .M S. (2021). Implementasi Penggunaan Dana Desa Di Desa Watu, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone. Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Puangrimaggalatung
- Crisbiantoro. (2017). Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Wilayah Tongauna Kabupaten Konawe, Tesis Magister Administrasi Pembangunan, Universitas Haluoleo.
- Darmiasih, Sulindawati, Darmawan. (2015). Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (Add) Pada Pemerintah Desa. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja, Indonesia.
- Daru W. (2008). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Universitas Diponegoro. Semarang
- Ekasari, R. (2020). Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi. Malang : AE Publisihing

Finda, Y. (2015). Manajemen Keuangan Desa Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2015. Prodi Akuntansi Ekonomi - Universitas Muhammadiyah Jember.

Heizer, J. and Render, B. (2011) Operations Management Edisi Kesembilan Buku Dua, Salemba Empat, Jakarta

Hessel and Tangkilisan, N.S. (2003). Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

<https://koreri.com/2021/02/09/inspektorat-teluk-bintuni-minim-sdm-untuk-awasi-dana-desa/>

[https://news.detik.com/berita/d-5999581/korupsi-dana-desa-di-pandeglang-bapak-anak-divonis-penjara-3-tahun-4-bulan?\\_ga=2.23710783.466133643.1649230624-608442602.1649230622](https://news.detik.com/berita/d-5999581/korupsi-dana-desa-di-pandeglang-bapak-anak-divonis-penjara-3-tahun-4-bulan?_ga=2.23710783.466133643.1649230624-608442602.1649230622)

<https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=kasus+korupsi+dana+desa+bintuni>

Iskandar, J. (2016). Perilaku Manusia dalam Kelompok dan Organisasi. Bandung: Puspaga.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. (2016). Buku bantu pengelolaan dan pembangunan desa.

KPK, (2015). Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa.

Lapananda, Y. (2016). Hukum Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.

Lena F., Febri Y., Kahar M., (2017). Implementasi Kebijakan Program Alokasi Dana Kampung (Adk). Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Program Studi Magister Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Universitas Riau.

Lili, M. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. Jurnal Ekonomi Daerah.

Luvia Intan, Sunariyanto dan Fiffudin. (2019). Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Desa. Program Studi Magister Ilmu administrasi. Dosen Program Studi Magister Ilmu Administrasi. Program Pascasarjana Universitas Islam Malang.

Marwansyah, (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia Cetakan Keempat, Bandung, Penerbit :Alfabeta

Masram dan Mu'ah. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia. In Zifatama Publisher.

Mukhtar, (2013). Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Edisi pertama. Penerbit Referensi, Jakarta.

Nurul, L.A. (2015). Implementasi Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kebumen. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. Semarang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Purwanto, Erwan A dan Dyah R. S. (2015). Implementasi kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media. Yogyakarta

Rani, E.D. (2015) . Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (Add) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. Universitas PGRI Yogyakarta. Yogyakarta.

Ratna, P. (2017). Manusia Sebagai MakhluK Sosial. Universitas Yogyakarta. Yogyakarta.

Robbin, S.P. (2001). Perilaku Organisasi. Terjemahan : Hadyana Pudjaatmaja. Jakarta: PT. PrenhallIndo.

Sedarmayanti. (2017). Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, Dan Produktivitas Kerja. Jakarta: PT. Refika Aditama.

Siagian, S. P. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Sintia, K. D. (2016). Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)

Sitorus, (2016). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. Kalimantan Timur

Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. Jurnal Singkai. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017. Universitas Padjajaran.

Stevenson, William J. dan Choung. (2014). Manajemen Operasi, edisi 9, alih bahasa : Diana Angelica, David wijaya dan Hirson Kurnia, Mc- Graw-Hill Education (Asia) dan Salemba Empat, Jakarta

Subroto A, (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Universitas Diponegoro Semarang. Semarang.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Suharwo. H, (2010). Peran Kepala Desa Dalam meningkatkan Pembangunan Desa,Skripsi, STPMD/APMD

Suparman , Dedi K, Dwi H. (2014). Implementasi Program Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

Suparno, A S. (2001). *Membangun Kompetensi Belajar*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Sujianto, (2008). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Teori dan Praktek*. Alfabeta

Tamim, F. (2002). *Pengembangan SDM Aparat dalam Meningkatkan Kinerja Birokrasi*, Jurnal Bisnis dan Birokrasi, No. 02/Vol.X/Mei/2002. Jakarta: Jurusan Ilmu administrasi, FISIF-UI.

Tim Dosen Mata Kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. (2009). *Program Studi Teknik Industri*. Fakultas Teknik. Universitas Wijaya Putra.

Tri, R. (2013). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Di Desa Jembul Dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto*. Fakultas Adminitrasi Publik. Universitas Brawijaya Indonesia.

Try, R., Sjamsiar, S., Imam, H., (2013). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Di Desa Jembul Dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto*. fakultas Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Indonesia.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 71-75.

Widodo, J. (2010). *Analisis kebijakan*. Malang: Bayumedia

Widodo. (1974). *Pengukuran Kerja*. Yogyakarta: Balai Universitas Gajah Mada.

Winarni and Yuanjaya. (2016). *Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Wukirsari, Kabupaten Sleman*. Yogyakarta.

Winarno, B. (2005). *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Yamulia H., R. Hamdani, H, dan Muhammad A, N. (2018). *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Magister Studi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

Yunus, E., S, D., Riyadi, S., Indrasari, M., and Putranto, T. D. (2019). *The effectiveness marketing strategy for ride-sharing transportation: intersecting social media, technology, and innovation*. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 7(2), 1424– 1434.

Yusriansyah D., Sri K., Neneng Y., Y. (2018). *Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Definitif pada tahun 2018*. Ilmu Pemerintahan, Pemerintahan, Politik, Sosial. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.